

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2002). Wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik (Soimah, 2014).

Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan (Hariyanto, 2012). Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Yosefrinaldi, 2013).

Laporan keuangan daerah pada dasarnya merupakan suatu asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah kepada pihak lain, yaitu pemangku kepentingan yang ada tentang kondisi keuangan pemerintah daerah. Agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Hapsari, 2008). Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan dapat dipenuhi dengan laporan yang disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Bowo, 2009).

Bagi Pemerintah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Adhi dan Suhardjo, 2013).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dasar pemikiran ini, berasal dari fakta bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester 1 Tahun 2016, BPK mengungkapkan Atas 221 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian umumnya disebabkan masih adanya kelemahan dalam penyajian laporan keuangan (IHPS 1 BPK RI Tahun 2016).

Fenomena mengenai permasalahan pelaporan keuangan, seperti disajikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2015, bahwa ada 35 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terlambat disampaikan untuk diperiksa oleh BPK. Selanjutnya, Harry Azhar Aziz (Ketua BPK) juga mengungkapkan bahwa permasalahan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada umumnya disebabkan karena para pejabat/pelaksana yang bertanggungjawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan. Selain itu, karena para pejabat/pelaksana belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, serta keterlambatan pemerintah daerah dalam mempersiapkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

Selain itu berikut adalah fenomena mengenai laporan keuangan:

Tabel 1.1

## Fenomena Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kriteria	Sumber	Nama pengarang	Fenomena
<b>Fenomena :</b> Kualitas Laporan Keuangan Daerah	<b>Diposting :</b> Senin, 12 Juni 2017 23:00WIB <a href="http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/06/12/laporan-keuangan-kota-bandung-wdp-lagi-ridwan-kamil-tetap-optimistis-403070">http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/06/12/laporan-keuangan-kota-bandung-wdp-lagi-ridwan-kamil-tetap-optimistis-403070</a>	Muhammad Ibnu S	<p>Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil yang baru saja menerima hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengaku menerima hasil yang sudah ditetapkan lembaga negara tersebut. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) itu tidak membuatnya patah semangat.</p> <p>Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan BPK adalah pendataan aset pemerintah yang belum tuntas. Pada pemeriksaan tahun lalu, BPK menetapkan ada sejumlah aset senilai Rp 11 triliun yang harus didata ulang. Dalam kurun waktu hanya setahun, pemerintah kota telah menyelesaikan sekitar 85% atau senilai kurang lebih Rp 9 triliun.</p>

	<p>Rabu, 30 Mei 2018 16:39 WIB</p> <p><a href="https://news.detik.com/jawabarat/4045429/kota-bandung-bandung-barat-dan-subang-gagal-raih-opini-wtp">https://news.detik.com/jawabarat/4045429/kota-bandung-bandung-barat-dan-subang-gagal-raih-opini-wtp</a></p>	<p>Mukhlis Dinillah</p>	<p>Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2017 kepada 27 kabupaten kota. Hasilnya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang yang gagal raih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Penyerahan LPH LKPD TA 2017 ini dilakukan secara bertahap kepada 27 kabupaten kota. TA 2017, hanya Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang yang masih mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).</p>
	<p>Jumat 04 Mei 2018 17:39 WIB</p> <p><a href="https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/05/04/p879mh335-iai-nilai-kualitas-pelaporan-keuangan-pemerintah-">https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/05/04/p879mh335-iai-nilai-kualitas-pelaporan-keuangan-pemerintah-</a></p>	<p>Wilda Fizriyani</p>	<p>Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menilai kualitas pelaporan keuangan pemerintah Indonesia masih rendah. Padahal situasi ini dapat menjadi peluang terjadinya tindak pidana korupsi, terutama korupsi di sejumlah pemerintahan daerah. IAI sebenarnya sudah menentukan standar kualitas pelaporan keuangan atau akuntansi pemerintah ke dalam lima level. Namun, belum ada</p>

	<a href="#">rendah</a>	<p>pemerintah daerah yang menyentuh level lima atau terbaik. Hingga saat ini, hampir sebagian besar pemerintahan Indonesia di Kabupaten/kota baru bisa mencapai level tiga dan dua. Kualitas laporan keuangan sangat penting untuk memitigasi terjadinya korupsi. Hal ini karena laporan keuangan merupakan bentuk dari transparansi pemerintah terhadap masyarakat. Untuk itu, agar transparansi kepada publik semakin kuat dengan pelaporan keuangan, peran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus ditingkatkan dalam melakukan pemeriksaan.</p>
--	------------------------	---

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan diberlakukannya hal tersebut

agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Pengembangan SAP mengacu pada praktik-praktik terbaik ditingkat Internasional dengan tetap mempertimbangkan kondisi di Indonesia baik peraturan perundangan dan praktik-praktik akuntansi yang berlaku (Nordawan dkk , 2010). SAP merupakan pelaksanaan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu Komite Standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. SAP merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Udiyanti, dkk, 2014). Apabila dikaitkan dalam proses penyusunan laporan keuangan, apabila entitas pelaporan belum dapat sepenuhnya menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka akan menyebabkan pada menurunnya kredibilitas laporan keuangan pemerintah dan kemampuan untuk dipahami oleh para pengguna.

Terkait dengan faktor penyebab menurunnya kredibilitas laporan keuangan pemerintah dan kemampuan untuk dipahami oleh para pengguna sebagaimana yang

telah diuraikan diatas, maka diperlukan adanya sistem informasi akuntansi yang baik pada entitas pelaporan agar dapat mendukung dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan. Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan atau group dari sub sistem / komponen / bagian apapun baik fisik / non fisik yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan (Azhar , 2013). Informasi yang dihasilkan melalui sistem informasi akuntansi kemudian dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berperan sebagai pengambil keputusan dalam suatu organisasi.

Sistem Informasi Akuntansi mengacu pada Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 yang direvisi oleh Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010, aturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007, sistem ini berbasis pada jaringan komputer yang mampu menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga data di Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik. Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi memiliki tujuan yaitu sebagai pengendalian perilaku bawahan (peran pengendalian) dan memudahkan pengambilan keputusan (peran manajemen keputusan).

Sistem Informasi Akuntansi dapat diterapkan secara manual maupun terkomputerisasi. Menurut Yuliani, dkk (2010) bahwa sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk dapat menghasilkan laporan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mia Oktarina, dkk (2016) yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang yang membedakan penulis dan peneliti sebelumnya yaitu perbedaan jumlah variabel independen yang di gunakan, dimana peneliti sebelumnya menggunakan tiga variabel independen sedangkan penulis hanya menggunakan dua variabel independen. Peneliti sebelumnya mengambil sampel sebanyak 227 orang responden. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Penelitian sebelumnya yang lain yaitu penelitian yang di lakukan oleh Heni Nurani H, dkk (2014) yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (survey pada Pemerintah Daerah di Jawa Barat) yang membedakan penulis dan peneliti sebelumnya yaitu perbedaan jumlah variabel independen yang di gunakan, dimana peneliti sebelumnya menggunakan satu variabel independen sedangkan penulis menggunakan dua variabel independen. Peneliti sebelumnya mengambil sampel sebanyak 18 orang responden.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Penelitian sebelumnya yang lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Berry Wan Saputra (2015) yang berjudul Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada SKPD Kota Pekanbaru) yang membedakan penulis dan peneliti sebelumnya yaitu perbedaan jumlah variabel independen yang digunakan, dimana peneliti sebelumnya menggunakan tiga variabel independen sedangkan penulis hanya menggunakan dua variabel independen. Peneliti sebelumnya mengambil sampel sebanyak 44 orang responden. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Adapun penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang lain yang dilakukan oleh Rukmi Juwita (2013) yang berjudul Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada objek penelitiannya. Penelitian sebelumnya

dilakukan pada wilayah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Survey Pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung)”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana mengidentifikasi pengelolaan implementasi standar akuntansi pemerintahan pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana mengidentifikasi pengelolaan sistem informasi akuntansi pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Bagaimana mengidentifikasi pengelolaan kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
4. Bagaimana mengidentifikasi pengelolaan implementasi standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

5. Bagaimana mengidentifikasi pengelolaan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
6. Bagaimana mengidentifikasi pengelolaan implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

### **1.2.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi pada SKPD Pemerintah Kota Bandung.
3. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan pada SKPD Pemerintah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan pada SKPD Pemerintah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Bandung.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Sistem Informasi Akuntansi pada SKPD Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Bandung.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Bandung.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Bandung.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Bandung.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain

##### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi.

##### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

###### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, mengenai pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.

###### **2. Bagi Instansi**

Sebagai salah satu sumbang pikiran dan alat penilaian agar implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi dapat berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan

dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah (studi kasus pada Pemerintah Kota Bandung).

### 3. Bagi Instansi Pendidikan

Dapat digunakan sebagai alat pertimbangan, acuan, dan referensi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan mengacu pada penelitian yang lebih baik.

## **1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian ini sekitar bulan Juli 2018 sampai dengan selesai.